



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : UND-20/PK/2020 05 Juni 2020
Sifat : Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Undangan Pembahasan Sisa DBH DR Tahun Anggaran 2019

Yth. (Sekretaris Daerah Terlampir)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, yang mengamanatkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pelaksanaan DBH DR untuk memastikan besaran sisa DBH DR setiap daerah, maka untuk selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi dan pembahasan penggunaan DBH DR dan sisa DBH DR setiap daerah bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon Saudara untuk menugaskan pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola keuangan dan OPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembahasan penggunaan DBH DR/Sisa DBH DR TA 2019 yang akan dilaksanakan melalui aplikasi *Zoom Meeting* pada:

hari/tanggal : Senin-Jumat/ 15-19 Juni 2020

waktu : 08.00 WIB s.d selesai

agenda : pembahasan penggunaan DBH DR dan Sisa DBH DR TA 2019

Bagi daerah provinsi, kabupaten, dan kota peserta pembahasan DBH DR agar dapat membawa dokumen pendukung yang akan diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan akan digunakan sebagai dasar perhitungan sisa DBH DR Definitif baru pada TA 2019 yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Laporan Penggunaan DBH DR Tahun Anggaran 2019;
2. LRA (terkait DBH DR) Tahun Anggaran 2019;
3. *Design Engineering Detail (DED)*;
4. RKA DBH DR Tahun Anggaran 2019;
5. SP2D; dan
6. Dokumen pendukung lainnya.

Untuk memperlancar proses pembahasan DBH DR, mohon dokumen pendukung dimaksud dapat dikirimkan terlebih dahulu melalui alamat email danareboisasi@gmail.com atau subditdanabagihasil@gmail.com.

Dapat disampaikan juga bahwa bagi pemerintah daerah yang tidak hadir dalam acara dimaksud, maka besaran Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota peserta pembahasan sisa DBH DR agar melakukan registrasi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 melalui link <https://bit.ly/EvaluasiDBHDRTA2019>. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Muhammad Anugerah Firdaus (0878-6932-1300) atau Hepy Siskayani (0857-2912-1366).

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, dimohon kehadiran Saudara/i tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya, dalam rangka menjaga integritas pelayanan kami agar kiranya tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.: PK.21/PK.214/2020



LAMPIRAN I

Undangan Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan

Nomor : UND- 20/PK/2020

Tanggal : 05 Juni 2020

DAFTAR UNDANGAN

1	Provinsi Aceh	101	Provinsi Sulawesi Utara
2	Kab. Aceh Barat	102	Kab. Bolaang Mongondow
3	Kab. Aceh Besar	103	Kab. Minahasa Selatan
4	Kab. Aceh Selatan	104	Kota Kotamobagu
5	Kab. Aceh Singkil	105	Kab. Bolaang Mongondow Utara
6	Kab. Aceh Tengah	106	Kab. Minahasa Tenggara
7	Kab. Aceh Timur	107	Kab. Bolaang Mongondow Timur
8	Kab. Aceh Utara	108	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
9	Kab. Bireuen	109	Provinsi Sulawesi Tengah
10	Kab. Pidie	110	Kab. Banggai
11	Kota Banda Aceh	111	Kab. Banggai Kepulauan
12	Kota Langsa	112	Kab. Buol
13	Kab. Aceh Barat Daya	113	Kab. Donggala
14	Kab. Aceh Jaya	114	Kab. Morowali
15	Kab. Nagan Raya	115	Provinsi Sulawesi Selatan
16	Kab. Bener Meriah	116	Kab. Pangkajene dan Kepulauan
17	Kota Subulussalam	117	Kab. Luwu Timur
18	Provinsi Sumatera Utara	118	Kab. Sidenreng Rappang
19	Kab. Asahan	119	Provinsi Sulawesi Tenggara
20	Kab. Dairi	120	Kab. Buton
21	Kab. Karo	121	Kab. Konawe
22	Kab. Labuhanbatu	122	Kab. Muna
23	Kab. Langkat	123	Kab. Konawe Utara
24	Kab. Mandailing Natal	124	Kab. Buton Utara
25	Kab. Simalungun	125	Kab. Kolaka Timur
26	Kab. Nias Selatan	126	Kab. Buton Tengah
27	Kab. Samosir	127	Kab. Buton Selatan
28	Kab. Padang Lawas	128	Provinsi Nusa Tenggara Barat
29	Provinsi Sumatera Barat	129	Kab. Bima
30	Kab. Agam	130	Kab. Dompu
31	Kab. Kepulauan Mentawai	131	Kab. Lombok Tengah
32	Kab. Solok	132	Kab. Lombok Timur
33	Kab. Dharmasraya	133	Kab. Sumbawa Barat
34	Kab. Solok Selatan	134	Kab. Flores Timur
35	Provinsi Riau	135	Provinsi Maluku

36	Kab. Indragiri Hulu	136	Kab. Kepulauan Tanimbar
37	Kab. Kampar	137	Kab. Maluku Tenggara
38	Kab. Kuantan Singingi	138	Kab. Buru
39	Kab. Pelalawan	139	Kab. Buru Selatan
40	Kab. Rokan Hilir	140	Provinsi Papua
41	Kab. Rokan Hulu	141	Kab. Merauke
42	Kab. Siak	142	Kab. Mimika
43	Kota Dumai	143	Kab. Nabire
44	Kota Pekanbaru	144	Kab. Sarmi
45	Kab. Kepulauan Meranti	145	Kab. Keerom
46	Provinsi Jambi	146	Kab. Waropen
47	Kab. Batang Hari	147	Kab. Mamberamo Raya
48	Kab. Bungo	148	Provinsi Maluku Utara
49	Kab. Merangin	149	Kota Ternate
50	Kab. Muaro Jambi	150	Kab. Halmahera Timur
51	Kab. Sarolangun	151	Kab. Halmahera Selatan
52	Kab. Tanjung Jabung Barat	152	Kab. Halmahera Utara
53	Kab. Tebo	153	Kota Tidore Kepulauan
54	Provinsi Sumatera Selatan	154	Kab. Pulau Morotai
55	Kab. Musi Banyuasin	155	Kab. Pulau Taliabu
56	Kab. Muara Enim	156	Provinsi Bangka Belitung
57	Kab. Ogan Komering Ilir	157	Kab. Bangka
58	Kab. Ogan Komering Ulu	158	Kab. Belitung
59	Kab. Banyuasin	159	Provinsi Gorontalo
60	Provinsi Bengkulu	160	Kab. Bone Bolango
61	Kab. Mukomuko	161	Kab. Gorontalo Utara
62	Kab. Lebong	162	Provinsi Kepulauan Riau
63	Provinsi Lampung	163	Kab. Natuna
64	Provinsi Jawa Tengah	164	Kab. Karimun
65	Kab. Cilacap	165	Kota Batam
66	Provinsi Jawa Timur	166	Kab. Lingga
67	Provinsi Kalimantan Barat	167	Kab. Bintan
68	Kab. Landak	168	Provinsi Papua Barat
69	Kab. Kapuas Hulu	169	Kab. Fak Fak
70	Kab. Ketapang	170	Kab. Manokwari
71	Kab. Mempawah	171	Kab. Sorong
72	Kab. Sambas	172	Kab. Sorong Selatan
73	Kab. Sintang	173	Kab. Teluk Bintuni
74	Provinsi Kalimantan Tengah	174	Kab. Teluk Wondama
75	Kab. Barito Selatan	175	Kab. Kaimana
76	Kab. Barito Utara	176	Kab. Maybrat
77	Kab. Kapuas	177	Kab. Tambrauw
78	Kab. Kotawaringin Barat	178	Provinsi Sulawesi Barat
79	Kab. Kotawaringin Timur	179	Kab. Mamuju
80	Kota Palangkaraya	180	Kab. Pasangkayu

81	Kab. Katingan	181	Provinsi Kalimantan Utara
82	Kab. Seruyan	182	Kab. Bulungan
83	Kab. Sukamara	183	Kab. Malinau
84	Kab. Lamandau	184	Kab. Nunukan
85	Kab. Gunung Mas	185	Kab. Tana Tidung
86	Kab. Murung Raya		
87	Kab. Barito Timur		
88	Provinsi Kalimantan Selatan		
89	Kab. Hulu Sungai Utara		
90	Kab. Tabalong		
91	Kab. Tapin		
92	Provinsi Kalimantan Timur		
93	Kab. Berau		
94	Kab. Kutai Kartanegara		
95	Kab. Kutai Barat		
96	Kab. Kutai Timur		
97	Kab. Paser		
98	Kota Bontang		
99	Kab. Penajam Paser Utara		
100	Kab. Mahakam Ulu		

LAMPIRAN II

Undangan Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan

Nomor : UND-20/PK/2020

Tanggal : 05 Juni 2020

**Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan *Run Down*
Kegiatan Pembahasan Penggunaan DBH DR Dan Sisa DBH DR TA 2019**

A. Petunjuk Teknis Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan melalui *virtual meeting* pada aplikasi zoom;
2. Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, Daerah melakukan registrasi sekaligus mengirimkan dokumen pendukung pembahasan melalui link <https://bit.ly/EvaluasiDBHDRTA2019> sebagaimana tercantum dalam surat undangan;
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 2 sekurang kurangnya meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan DBH DR Tahun Anggaran 2019;
 - b. LRA (terkait DBH DR) Tahun Anggaran 2019;
 - c. *Design Engineering Detail (DED)*;
 - d. RKA DBH DR Tahun Anggaran 2019;
 - e. SP2D; dan
 - f. Dokumen pendukung lainnya.
 - g. Laporan Penggunaan DBH DR TA 2019 (bagi daerah yang belum menyampaikan)

Untuk memperlancar proses pembahasan DBH DR, mohon dokumen pendukung dimaksud dapat dikirimkan terlebih dahulu melalui alamat email danareboisasi@gmail.com atau subditdanabagihasil@gmail.com.

4. Seluruh daerah mengikuti acara pembukaan yang dalam acara tersebut juga akan diinformasikan kembali terkait petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
5. Berdasarkan data registrasi yang diterima, DJPK menyampaikan jadwal pelaksanaan *virtual meeting* untuk masing-masing daerah;
6. Pelaksanaan pembahasan dilakukan per daerah dan akan dilakukan dalam *breakout room* pada aplikasi zoom sebagaimana dimaksud pada poin 1;
7. Pada hari H pelaksanaan, Daerah dimohon sudah hadir pada *main room zoom* 10 menit, sebelum jadwal yg telah ditentukan;



8. Pembahasan untuk masing-masing Daerah dilaksanakan maksimal 1 jam;
9. Hasil pembahasan ditetapkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perwakilan Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri;
10. Berita acara akan ditandatangani secara digital, oleh karenanya dimohon calon penandatangan BA Rekonsiliasi memasukkan email aktif saat melakukan registrasi);
11. Kegiatan pembahasan selesai.

B. *Run Down* Kegiatan

Hari, Tanggal dan Waktu	Kegiatan
Jumat, 12 Juni 2020	Daerah melakukan registrasi sekaligus mengirimkan dokumen pendukung pembahasan melalui link https://bit.ly/EvaluasiDBHDRTA2019
Senin – Jumat 15 – 19 Juni 2020 Pukul 08.00 – 09.00 WIB 09.00 – 12.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 13.00 – 15.00 WIB 15.00 – 15.30 WIB 15.30 – 17.00 WIB	Pembukaan (meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya, <i>keynote speech</i> , paparan kebijakan DBH DR, dan penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan) Pembahasan evaluasi penggunaan sesi 1 ISHOMA Pembahasan evaluasi penggunaan sesi 2 ISHOMA Pembahasan evaluasi penggunaan sesi 3